DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aprita, Serlika. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Palembang: Setara Press, 2018.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Fuady, Munir. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.

Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Cet. VI. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Cetakan ke-7. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.

Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Cet. ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Hartono, Siti Soemarti. *Seri Hukum Dagang, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1993.

Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.

Nating, Imran. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Prasetya, Rudhi. *Likuidasi Sukarela dalam Hukum Kepailitan*. Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996.

Rusli, Tami. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2019.

Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2019.

Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Rajawali Press, 2010.

Sutiantio, Retnowulan. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*. Jakarta: Varia Yustisia, 2001.

Suyudi, Aria, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbyanti. *Analisa Hukum Kepailitan Indonesia, Kepailitan di Negeri Pailit*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004.

Widjaja, Gunawan. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

Widjaja, Gunawan. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Absi, Warmiyana Zairi, Putri Sari Nilam Cayo, Martini, dan Serlika Aprita. "Kepailitan Perusahaan Pembiayaan: Hak dan Upaya Hukum Kreditur dalam Proses Kepailitan." *Disiplin Jurnal Ilmu Hukum* 31, no. 1 (2025): 1–10.

Arif, Ingrid Angelina Lukito, dan Widyawati Boediningsih. "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Usaha Negara yang Terkait dengan Penerapan Pasal 87(4) UU ASN (Studi Putusan Nomor: 9/G/2018/PTUN-BNA)." *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 1 (2022): 24–39.

Genta, I Nyoman Yatna Dwipayana, dan I Nyoman Suyatna. "Penerapan Konsep Going Concern bagi Perseroan Terbatas yang Telah Dinyatakan Pailit." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (2020): 254.

Harir, Moh, dan Zaenal Soegianto Arifin. "Konflik Norma (Antinomy Normen) Sita Umum dengan Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 1107–1125.

Prasetyo, Abigail. "Kedudukan Organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Badan Hukum Perseroan Perorangan." *Jurist-Diction* 6, no. 3 (2023): 385–408.

Ramadhini, Nabila Alya, dan Rosalinda Elsina Latumahina. "Analisis Kesesuaian Putusan Pengadilan Niaga Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg dengan Prinsip Tes Insolvensi." *Yustitiabelen* 11, no. 2 (2025): 17–37.

Sumakud, Deanne Lauretta, dan Rr Ani Wijayati. "Analisis Yuridis Kedudukan Sita Umum yang Dilakukan Kurator Terhadap Sita Pidana dalam Pemberesan Boedel Pailit." *Jurnal Hukum To-Ra* 10, no. 1 (2024).

Tryadi, Louis, dan Sri Wahyu Ananingsih. "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham dalam Pemberesan Harta Perseroan Terbatas Terbuka yang Pailit." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 2 (2024): 1046–1056.

Wikrama, I Gusti Ngurah Anantha, Jayaningrat, Elma Putri Tanbun, Lailatu Komaria, dan Gerry Arthadi. "Perlindungan Hukum atas Dua Putusan Pernyataan Pailit terhadap Debitor yang Sama." *Notaire* 7, no. 3 (2024): 421–444.

Yosephin, Priscila Patricia. "Analisis Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) yang Tidak Beroperasi." *Recital Review* 3, no. 40 (2021): 314–330.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Kemenkumham, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. ke-41. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

Sumber Daring

Hukumonline. "Menurun di Tahun Lalu, PKPU dan Kepailitan Diprediksi Meningkat di 2025." Hukumonline, 3 Februari 2025. Diakses 1 Maret 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/menurun-di-tahun-lalu--pkpu-dan-kepailitan-diprediksi-meningkat-di-2025-lt67a099fbc1fe4/.